

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PEKERJAAN
TUKANG GIGI DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HAK ATAS
INFORMASI MEDIS BAGI PENGGUNA JASA TUKANG GIGI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
JUNCTO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN PEKERJAAN
TUKANG GIGI**

CHINTYA VAYO GRACIANA GINTING

1587068

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan pengetahuan di bidang ilmu kesehatan gigi menuntut biaya peningkatan biaya jasa dokter gigi. Sementara itu, banyak masyarakat di Indonesia yang membutuhkan perawatan gigi tetapi tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perawatan di dokter gigi. Maka dari itu, masyarakat yang membutuhkan perawatan gigi beralih kepada tukang gigi gigi daripada pergi ke dokter gigi. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, banyak tukang gigi yang menawarkan jasa cabut gigi, tambal gigi, pemasangan kawat gigi atau gigi palsu permanen. Kenyataannya tukang gigi tidak berwenang untuk menawarkan jasa tersebut. Peraturan yang berlaku hanya memperbolehkan tukang gigi untuk melakukan pekerjaan berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan, alhasil banyak pengguna jasa tukang gigi yang mendapat kerugian akibat jasa terlarang yang ditawarkan oleh tukang gigi.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan juga pendekatan Undang-Undang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi yang mendapat kerugian serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi yang melanggar peraturan sudah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Maka yang diperlukan adalah upaya-upaya agar tukang gigi tidak menawarkan jasa terlarang lagi dan korban tukang gigi berkurang, yaitu dengan memaksimalkan pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Begitu juga dengan hak informasi yang dimiliki pengguna jasa tukang gigi harus ditegakkan dengan cara menambahkan aturan terkait informasi medis bagi tukang gigi dan didukung oleh pengawasan dari pemerintah setempat.

Kata Kunci : tukang gigi, pembinaan, pengawasan, perizinan dan hak informasi medis

**LEGAL REVIEW OF THE DENTAL ARTISANS REGULATIONS
CONNECTED TO THE ENFORCEMENT OF MEDICAL INFORMATION
RIGHTS FOR DENTAL ARTISANS USERS REVIEWED FROM
INDONESIAN HEALTH ACT NUMBER 36 OF 2009 JUNCTO MINISTER
OF HEALTH REGULATION NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING
DEVELOPMENT, SUPERVISION AND LICENSING OF DENTAL
ARTISANS**

**CHINTYA VAYO GRACIANA GINTING
1587068**

ABSTRACT

Development of technology and knowledge of dental health lead to increased costs for dental health services. Meanwhile, many people in Indonesia that need dental care but do not afford the cost for dental treatments. So people who need dental care prefer to go to dental artisan rather than going to the dentist. To get more benefits, many dental artisans offer dental extraction, dental fillings, braces and also permanent dentures. In fact, dental artisans are not authorized to offer these services. The applicable regulations only allow dental artisans to make and to set removable dentures, as a result many dental service users who suffer due to prohibited services offered by dental artisans.

This research is a normative juridical research that has described by using conceptual approach and statute approach. The kind of data that used in this research was secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials.

The regulations for dental artisans in Indonesia can not hold the dental artisans to offer illicit services that growth some cases. So what required is efforts to prevent dental artisans from offering illicit services and reduce the number of dental artisans' victims by improve the regulation of guidance, supervision and licensing of dental artisans. Also the information rights owned by dental artisan users must be enforced by adding new rules regarding medical information for dental artisans users and supported by supervision from the local government

Keywords : dental artisans, guidance, supervision, licensing and medical information right

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	17

G. Sistematika Penulisan	18
--------------------------------	----

BAB II : TINJAUAN TEORITIS ATAS PERATURAN TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI DI INDONESIA

A. Pengertian Pekerjaan Tukang Gigi	24
B. Sejarah Tukang Gigi di Indonesia	27
C. Peraturan Pekerjaan Tukang Gigi dan Kewenangan Tukang Gigi	30
1. Peraturan Pekerjaan Tukang Gigi	30
2. Kewenangan Tukang Gigi	31
D. Kewajiban dan Tanggung Jawan Tukang Gigi	33
1. Kewajiban Tukang Gigi	33
2. Tanggung Jawab Tukang Gigi	38
E. Hak Tukang Gigi	40
F. Wawancara Penulis dengan Korban Tukang Gigi	41

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENEGAKAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI MEDIS BAGI PENGGUNA JASA TUKANG GIGI

A. Hak Asasi Manusia atas Kesehatan	44
B. Informasi Medis	53

C. Hak Pasien atas Informasi Medis	55
D. Kewajiban Tenaga Kesehatan atas Informasi Medis	57
E. Peraturan Hak Informasi Medis bagi Pengguna Jasa Tukang Gigi ..	60

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Tinjauan atas Pelaksanaan Peraturan Terkait Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi untuk Melindungi Pasien Tukang Gigi	63
B. Tinjauan terhadap Penegakan Hak atas Informasi Medis bagi Pengguna Jasa Tukang Gigi	78

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--